PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN), PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

TARISYA ANANTA SABILLA
NIM. B1011211065

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Tarisya Ananta Sabilla
NIM	:	B1011211065
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 24 September 2025



Tarisya Ananta Sabilla
NIM. B1011211065

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Tarisya Ananta Sabilla
NIM	:	B1011211065
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 24 September 2025



Tarisya Ananta Sabilla
NIM. B1011211065

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Tarisya Ananta Sabilla
B1011211065

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA)	:	23 Juli 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Prof. Dr. H. Eddy Suratman, S.E., M.A. NIP 196707071992021001	25/08/25	
2.	Ketua Penguji	Dr. Jumhur, S.E., M.Si NIP 196709281997021001	20/08/25	
3.	Anggota Penguji	Nindya Lestari, S.E., M.Sc. NIP 199303212019032025	19/08/25	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 15 SEP 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya kepada saya sehingga Tugas Akhir yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat" dapat diselesaikan dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisni, Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang membantu serta memberikan saran dan masukan. Dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Prof. Dr. H. Eddy Suratman., S.E., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, saran, pemikiran, bimbingan, semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Jumhur, S.E., M.Si selaku Ketua Penguji Tugas Akhir yang telah memberikan koreksi, bimbingan dan masukan kepada penulis dalam proses penyempurnaan Tugas Akhir.
6. Ibu Nindya Lestari, S.E., M.Sc selaku Anggota Penguji Tugas Akhir yang telah memberikan koreksi, bimbingan dan masukan kepada penulis dalam proses penyempurnaan Tugas Akhir.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan banyak ilmu kepada penulis, terkhusus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Seluruh Staf Kebersihan, Staf Keamanan, Staf Perpustakaan, Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa/i, terkhususnya Bapak/Ibu yang selalu menebarkan senyum manis ketika bertemu, sehingga memancarkan kehangatan setiap hari bagi penulis.
9. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua penulis, Bapak Abang Sabran dan Ibu

Lily Safariyanti yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk tetap semangat dan dapat menyelesaikan Tugas Akhir, terlebih dalam menembuh pendidikan di jenjanb ini.

10. Terimakasih kepada Saudara kandung satu – satunya, Arafi Putra Anugrah yang sangat penulis sayangi. Terima kasih sudah menjadi motivasi bagi penulis agar terus berjuang dalam menyelesaikan tanggung jawab menyusun Tugas Akhir ini.
11. Kakek dan Nenek penulis, Alm, Bapak Adnan Tagore dan Almh, Ibu Wenny Hak Khim yang telah merawat dan membesarkan saya dari kecil hingga dewasa, memberikan kasih sayang dan perhatian, sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita – cita.
12. Terimakasih kepada seseorang yang saya sayangi, Muhamad Ikhsan. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan Tugas Akhir ini, telah mendengar banyak keluh kesah, menemani saya disaat senang dan sedih, dan selalu sabar untuk menghadapi kecerobohan dan cerewetnya saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga saat ini. Mari tetap berjuang bersama hingga kita dapat pulang ke rumah yang sama.
13. Terimakasih kepada Sahabat masa kecil hingga sekarang, Aulia Berliana yang selalu menemani hingga titik ini, bersedia mendengarkan keluh kesah, menghibur penulis jika penulis merasa down dan tidak bersemangat, terimakasih atas semangatnya yang telah diberikan.
14. Terimakasih kepada Sahabat SMP seperjuangan, Desya Emi Syah Fitri dan Widya Septia Ningrum yang selalu menemani hingga berada dititik ini, hadir di kala suka maupun duka, menampung setiap keluh kesah dan menghibur di kala suntuk, serta tak henti – hentinya memberikan masukan terbaik bagi penulis.
15. Terimakasih kepada Teman Magang, Stevi yang selalu jadi tempat berbagi cerita, saling bantu satu sama lain, nemenin setiap proses selama magang dan selama penulisan Tugas Akhir ini.
16. Terimakasih kepada Teman – teman "Amarsa" (Firda, Aliya, Ulfa, Wirda) yang selalu ada di setiap suka dan duka. Kalian tidak hanya menjadi tempat cerita, tapi juga juga support system terbaik yang selalu kasi semangat dan tawa. *See u on top, guys!*
17. Terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini dan tidak dapat disebutkan oleh penulis satu per satu.
18. Tarisya Ananta Sabilla, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar – besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk setiap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan masukan yang bersifat membangun agar Tugas Akhir ini menjadi tulisan yang baik. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, terkhsusunya dalam ruang lingkup penelitian.

Pontianak, 24 September 2025

Tarisya Ananta Sabilla

NIM. B1011211065

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN), PENANAMAN MODAL ASING (PMA), DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data sekunder periode 2013–2023 berupa data panel 10 tahun dengan 14 Kabupaten/Kota dengan jumlah 140 observasi, diolah menggunakan Eviews 12. Hasil menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi berhubungan negatif signifikan, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berhubungan negatif namun tidak signifikan, Penanaman Modal Asing (PMA) berhubungan positif tidak signifikan dan Indeks Pembangunan Manusia berhubungan positif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Secara simultan, kelima variabel berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN), PENANAMAN MODAL ASING (PMA), DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh : Tarisya Ananta Sabilla

Fakultas Ekonomi dan Bisni, Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

Latar Belakang

Pengangguran masih menjadi masalah sosial dan ekonomi di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional pada Agustus 2023 mencapai 7,07%, sedangkan di Kalimantan Barat sebesar 5,05%. Meski lebih rendah dari rata-rata nasional, Kalimantan Barat tetap menghadapi tantangan berupa keterbatasan lapangan kerja dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Data antar kabupaten/kota menunjukkan variasi: Sekadau sering mencatat TPT rendah, sementara Pontianak dan Singkawang relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi, dan meskipun meningkat, tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan pengangguran. Kebijakan upah minimum juga memiliki dampak ganda—dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja, namun berpotensi mengurangi perekrutan oleh perusahaan. Selain itu, investasi baik dari PMDN maupun PMA belum sepenuhnya menekan TPT karena lebih banyak diarahkan ke sektor padat modal yang minim penyerapan tenaga kerja. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat juga tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan pengangguran, karena peningkatan kualitas SDM sering membuat tenaga kerja lebih selektif dalam mencari pekerjaan.

Permasalahan

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
4. Apakah Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
5. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan di 14 Kabupaten/Kota selama periode 2013–2023, dengan pengecualian tahun 2020 akibat kontraksi ekonomi karena pandemi COVID-19. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kausalitas dengan data sekunder berupa data panel yang diperoleh dari BPS, DISNAKERTRANS Kalimantan Barat, dan jurnal terkait. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin besar peluang terciptanya lapangan kerja baru sehingga dapat menekan angka pengangguran. Sebaliknya, upah minimum berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan, menandakan bahwa kenaikan upah belum mampu secara nyata mengurangi pengangguran karena bagi sebagian perusahaan hal ini justru meningkatkan beban biaya produksi dan menghambat perekrutan tenaga kerja baru. PMDN juga berpengaruh negatif tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa meskipun investasi domestik meningkat, penyerapan tenaga kerja belum optimal karena sebagian besar investasi diarahkan ke sektor yang padat modal. Berbeda halnya dengan PMA yang berpengaruh positif meskipun tidak signifikan, menandakan bahwa arus modal asing lebih banyak masuk ke sektor berbasis teknologi atau industri yang minim kebutuhan tenaga kerja sehingga tidak berkontribusi langsung terhadap penurunan TPT. Sementara itu, IPM berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti peningkatan kualitas SDM tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan pengangguran; justru pada beberapa daerah, tingginya IPM diikuti dengan angka pengangguran yang tinggi karena masyarakat lebih selektif dalam memilih pekerjaan dan persaingan kerja semakin ketat di wilayah perkotaan. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa hanya pertumbuhan ekonomi yang konsisten berperan dalam menurunkan TPT, sedangkan variabel lain menunjukkan pengaruh yang lebih kompleks dan sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi, distribusi investasi, serta karakteristik tenaga kerja di masing-masing

daerah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kalimantan Barat, sedangkan upah minimum dan PMDN berpengaruh negatif tidak signifikan, PMA berpengaruh positif tidak signifikan, dan IPM berpengaruh positif signifikan. Artinya, hanya pertumbuhan ekonomi yang terbukti konsisten menekan pengangguran, sementara variabel lain masih dipengaruhi oleh kondisi struktural daerah dan sektor investasi. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menyesuaikan kebijakan upah minimum dengan kemampuan dunia usaha, mengarahkan investasi ke sektor padat karya, serta meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

LEMBAR YURIDIS

UCAPAN TERIMAKASIH

ABSTRAK

RINGKASAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

ABSTRAK

1. PENDAHULUAN
2. KAJIAN LITERATUR
   - 2.1 Teori Pengangguran Klasik
   - 2.2 Teori Hukum Okun
   - 2.3 Teori Upah Efisiensi
   - 2.4 Teori Harrod-Domar
   - 2.5 Teori Pertumbuhan Baru
   - 2.6 Tinjauan Empiris
   - 2.7 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian
     - 2.7.1 Kerangka Konseptual
     - 2.7.2 Hipotesis Penelitian
3. METODE PENELITIAN
   - 3.1 Bentuk Penelitian
   - 3.2 Jenis dan Sumber Data
   - 3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
   - 3.4 Metode dan Alat Analisis
     - 3.4.1 Uji Spesifikasi Model
     - 3.4.2 Uji Asumsi Klasik
     - 3.4.3 Uji Hipotesis
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
   - 4.1 Hasil Penelitian
   - 4.2 Pembahasan
     - 4.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
     - 4.2.2 Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
     - 4.2.3 Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
     - 4.2.4 Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
     - 4.2.5 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat

Pengangguran Terbuka
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1 Kesimpulan
5.2 Rekomendasi

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat dalam hitungan Persen (%) Tahun 2018 – 2023

Tabel 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023

Tabel 3 Tabel Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023

Tabel 4 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023

Tabel 5 Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023

Tabel 7 Definisi Operasional Setiap Variabel

Tabel 8 Hasil Uji Chow, Uji Hausman, Uji Langranger Multiplier

Tabel 9 Hasil Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera

Tabel 10 Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 12 Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 13 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 14 Hasil Uji F – Statistik

Tabel 15 Hasil Uji Koefisiensi Determinan R2

Tabel 16 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2023

Tabel 17 Tabel Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Tabel 18 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

Tabel 19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Tabel 20 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN), PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tarisya Ananta Sabilla[1]
Universitas Tanjungpura, Indonesia

Prof. Dr. H. Eddy Suratman., S.E., M.A[2]
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the influence of Economic Growth, Minimum Wage, Domestic Investment (PMDN), Foreign Investment (PMA), and Human Development Index on the Open Unemployment Rate in the Districts/Cities of West Kalimantan Province. This quantitative study uses secondary data for the period 2013–2023 in the form of 10 year panel data with 14 Districts/Cities with a total of 140 observations, processed using Eviews 12. The results show that Economic Growth has a significant negative relationship, Minimum Wage, Domestic Investment (PMDN) has a negative but insignificant relationship, Foreign Investment (PMA) has a positive but insignificant relationship and the Human Development Index has a significant positive relationship to the Open Unemployment Rate. Simultaneously, the five variables have a significant effect on open unemployment in West Kalimantan.

Keywords: **:** *Economic Growth, Minimum Wage, Domestic Investment, Foreign Investment, Human Development Index and Open Unemployment Rate*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data sekunder periode 2013–2023 berupa data panel 10 tahun dengan 14 Kabupaten/Kota dengan jumlah 140 observasi, diolah menggunakan Eviews 12. Hasil menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi berhubungan negatif signifikan, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berhubungan negatif namun tidak signifikan, Penanaman Modal Asing (PMA) berhubungan positif tidak signifikan dan Indeks Pembangunan Manusia berhubungan positif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Secara simultan, kelima variabel berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

1. PENDAHULUAN

Pengangguran masih merupakan masalah yang signifikan secara sosial dan ekonomi di Indonesia. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase penganggur terhadap total angkatan kerja, menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2021). Pada Agustus 2022, TPT nasional berada di angka 5,28% dan meningkat menjadi 7,07% pada Agustus 2023. Kenaikan ini mencerminkan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar kerja masih dirasakan. Namun, kondisi berbeda terlihat di Provinsi Kalimantan Barat yang justru mengalami perbaikan, dengan TPT menurun menjadi 5,05% pada Agustus 2023, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterampilan tenaga kerja yang belum merata dan terbatasnya kesempatan kerja. Pengangguran biasanya terjadi ketika jumlah orang yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada jumlah pekerjaan yang tersedia (Helvira & Rizki, 2020). Salah satu indikator yang lazim digunakan untuk mengukur pengangguran adalah TPT, yang mencakup individu yang sedang mencari pekerjaan, merintis usaha, maupun menunggu panggilan kerja (Garnella Riska dkk., 2020). Informasi mengenai TPT di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2018–2023 ditampilkan pada Tabel 1 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat.

Tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dalam hitungan Persen (%) Tahun 2018 – 2023

Kabupaten/Kota	Data Tingkat Pengangguran Terbuka				
	2018	2019	2021	2022	2023
Sambas	3.3	3.48	3.97	5.08	5.04
Bengkayang	2.36	2.66	4.42	2.84	2.92
Landak	2.23	2.69	3.22	1.78	2.24
Mempawah	6.79	5.11	7.71	7.48	7.33
Sanggau	2.42	3	3.45	3.76	3.86
Ketapang	3.17	4.39	6.94	6.71	6.57
Sintang	2.28	3.1	3.95	2.97	2.92
Kapuas Hulu	1.54	2.43	4.18	2.21	2.19
Sekadau	2.75	3.04	2.92	1.33	2.29
Melawi	3.05	2.39	2.66	1.95	2.46
Kayong Utara	3.86	3.89	3.78	3.1	3.04
Kubu Raya	4.94	5.5	7.02	6.87	6.76
Kota Pontianak	10.21	9.06	12.38	9.92	8.92
Kota Singkawang	7.75	6.31	9.16	9.92	8.51
Kalimantan Barat	4.18	4.35	5.82	5.11	5.05

Sumber : BPS Kalimantan Barat (2024)

Berdasarkan Tabel 1 yang memuat data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Barat periode 2018–2023, terlihat bahwa kondisi ketenagakerjaan di masing-masing kabupaten/kota menunjukkan variasi dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Secara umum, TPT Kalimantan Barat mengalami pergerakan yang berfluktuasi, dari 3,3% pada tahun 2018 hingga mencapai 4,82% pada 2023. Beberapa daerah, seperti Mempawah, Landak, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi secara konsisten mencatatkan angka TPT di bawah rata-rata provinsi. Di antara daerah tersebut, Kabupaten

Sekadau tampak menonjol karena tingkat pengangguranya kerap berada jauh di bawah rata-rata Kalbar sekitar 5,05%, bahkan pada beberapa tahun tertentu turun hingga kurang dari 1%. Hal ini menunjukkan adanya pasar kerja yang relatif lebih stabil serta kemampuan daerah tersebut dalam menyerap tenaga kerja secara lebih optimal.

Namun demikian, terdapat beberapa daerah yang menghadapi tantangan lebih besar dalam penyediaan lapangan kerja. Tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi dibandingkan rata – rata Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan hal ini. Kota Singkawang, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya termasuk di antaranya. Kota Pontianak, sebagai pusat aktivitas pemerintahan sekaligus ekonomi, mencatat TPT yang relatif tinggi, yakni 10,78% pada tahun 2021 dan masih 8,80% pada 2023, angka yang jauh melampaui rata-rata provinsi. Kabupaten Mempawah juga sering menunjukkan nilai TPT di atas rata-rata Kalbar. Sementara itu, Kabupaten Sambas, Ketapang, dan Kayong Utara memperlihatkan pola yang berfluktuasi—kadang berada di bawah, namun pada waktu lain mendekati rata-rata provinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja pasar tenaga kerja di ketiga daerah tersebut tidak selalu stabil, bisa lebih baik maupun lebih buruk dibandingkan rata-rata tingkat provinsi. Pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); semakin pesat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, umumnya semakin besar pula peluang usaha dan kesempatan kerja yang tercipta (Roring dkk., 2020). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi di tingkat daerah. PDRB menunjukkan nilai tambah dari berbagai aktivitas ekonomi di daerah tersebut (Disbudpar, 2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tabel 2 menampilkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat sepanjang periode 2018–2023.

Tabel 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2018–2023

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi				
	2018	2019	2021	2022	2023
Sambas	4.93	4.75	4.37	4.64	4.69
Bengkayang	5.25	5.14	4.33	5.45	4.68
Landak	4.92	4.9	4.88	4.64	4.39
Mempawah	5.76	5.78	4.1	4.7	5.09
Sanggau	4.21	3.73	4.19	4.61	2.04
Ketapang	7.83	6.58	5.23	5.42	1.1
Sintang	5.15	4.99	3.8	4.96	4.68
Kapuas Hulu	4.66	3.8	4.43	4.51	4.62
Sekadau	5.83	5.44	4.31	5.1	4.69
Melawi	5.25	4.41	4.54	4.9	4.56
Kayong Utara	4.94	4.97	4.6	5.03	4.48
Kubu Raya	5.25	5.68	5.18	5.48	4.98
Kota Pontianak	4.22	4.02	4.61	4.97	7.76
Kota Singkawang	4.64	4.41	4.82	4.97	5.06
Kalimantan Barat	5.07	5.09	4.8	5.07	4.46

Sumber : BPS Kalimantan Barat (2024**)**

Berdasarkan Tabel 2, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada periode 2018–

2023 menunjukkan pola fluktuatif, yakni dari 4,93% pada tahun 2018 menurun menjadi 4,76% pada 2023. Sejumlah kabupaten/kota seperti Landak, Sintang, Sekadau, Kubu Raya, dan Kota Singkawang secara konsisten mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata provinsi. Capaian tersebut mencerminkan dinamika ekonomi yang relatif kuat, terutama di Sintang dan Sekadau yang mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi, serta Kubu Raya yang berfungsi sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi. Sebaliknya, Mempawah dan Sanggau cenderung mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Kalbar, menunjukkan adanya kendala dalam mendorong pembangunan secara optimal. Sementara itu, Kabupaten Ketapang memperlihatkan pergerakan yang lebih berfluktuasi, dengan pertumbuhan yang pada beberapa periode berada di atas rata-rata, tetapi pada tahun tertentu—seperti 2023—justru mengalami penurunan tajam. Kondisi ini diperkirakan berkaitan dengan ketergantungan pada sektor tertentu serta ketidakstabilan arus investasi.

Meskipun secara umum tingkat pengangguran cenderung menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa wilayah di Kalimantan Barat yang justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang turut memengaruhi, seperti struktur ekonomi yang lebih padat modal maupun kebijakan upah minimum daerah yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah kebijakan penetapan upah minimum di tingkat kabupaten/kota. Regulasi pemerintah mengenai upah memiliki peran signifikan dalam membentuk dinamika pengangguran di daerah. Secara teoritis, kenaikan upah dapat mengurangi permintaan tenaga kerja dan berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran (Helvira & Rizki, 2020). Sebaliknya, penurunan upah cenderung mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga jumlah kesempatan kerja yang tersedia juga bertambah. Dengan demikian, terdapat keterkaitan positif antara tingkat upah yang berlaku dengan jumlah tenaga kerja yang dapat terserap (Irawan, 2022).

Secara umum, gaji memiliki sifat tetap dan dibayarkan setiap bulan, sehingga tidak bergantung langsung pada jumlah jam kerja maupun tingkat produksi. Stabilitas hubungan kerja biasanya tercermin melalui penerimaan gaji tersebut, yang umumnya dilengkapi dengan berbagai fasilitas tambahan, seperti jaminan kesehatan, program pensiun, hingga perlindungan sosial. Sebaliknya, pekerja tidak terampil, seperti buruh harian, buruh kontrak, atau buruh kasar, yang pekerjaannya cenderung berpindah-pindah, lebih sering memperoleh bayaran dalam bentuk upah. Berbeda dari gaji, upah memiliki sifat yang lebih fleksibel karena dapat ditentukan melalui kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, jumlah output yang dihasilkan, ataupun berdasarkan satuan waktu tertentu, seperti satu hari atau satu minggu. Oleh karena itu, perubahan kondisi ekonomi maupun fluktuasi permintaan tenaga kerja lebih berpengaruh terhadap besar kecilnya upah.

Di Indonesia, pemerintah setiap tahun menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai salah satu alat yang digunakan dalam kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah pembayaran gaji yang tidak memadai dan memastikan standar hidup minimum bagi karyawan. Penetapan upah minimum memiliki implikasi ganda. Dari sisi positif, kenaikan UMP dapat menarik lebih banyak tenaga kerja untuk bergabung ke pasar kerja dengan harapan memperoleh pendapatan yang lebih baik,

sehingga berpotensi menekan angka pengangguran. Namun, dari sisi lain, peningkatan upah juga dapat mendorong perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan melalui pemutusan hubungan kerja, yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Mengacu pada data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Barat, perkembangan upah minimum kabupaten/kota di wilayah tersebut selama periode 2018–2023 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023

Kabupaten/Kota	Data Upah Minimum Kabupaten				
	2018	2019	2021	2022	2023
Sambas	2,200,000	2,377,000	2,580,000	2,609,393	2,792,599
Bengkayang	2,189,000	2,364,777	2,566,019	2,586,291	2,767,564
Landak	2,175,200	2,349,870	2,549,844	2,582,000	2,767,310
Mempawah	2,066,600	2,232,600	2,422,594	2,437,279	2,606,472
Sanggau	2,145,310	2,318,000	2,515,262	2,547,405	2,703,536
Ketapang	2,439,300	2,636,000	2,860,323	2,876,252	3,085,615
Sintang	2,215,000	2,393,000	2,596,644	2,611,966	2,771,035
Kapuas Hulu	2,204,650	2,381,700	2,483,000	2,486,796	2,661,842
Sekadau	2,099,386	2,267,970	2,461,000	2,486,031	2,654,770
Melawi	2,118,214	2,288,306	2,483,000	2,515,896	2,703,536
Kayong Utara	2,315,850	2,501,850	2,714,750	2,748,507	2,930,678
Kubu Raya	2,075,000	2,242,000	2,433,000	2,467,630	2,646,878
Kota Pontianak	2,145,000	2,318,000	2,515,000	2,579,616	2,750,644
Kota Singkawang	2,164,991	2,338,840	2,537,875	2,596,120	2,781,898
Kalimantan Barat	2,211,500	2,399,698	2,399,698	2,434,328	2,608,601

Sumber : Disnakertrans (2024)

Berdasarkan Tabel 3, perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kalimantan Barat pada periode 2018–2023 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten di seluruh wilayah. Rata-rata provinsi, yakni UMK Kalimantan Barat, naik dari Rp2.211.500 pada 2018 menjadi Rp2.608.601 pada 2023. Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, sebagian besar kabupaten/kota menetapkan UMK yang relatif seimbang atau sedikit lebih tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2018 beberapa daerah seperti Sambas, Mempawah, Landak, Sanggau, Kapuas Hulu, Sekadau, Melawi, serta Kayong Utara memiliki UMK yang hampir setara dengan rata-rata provinsi. Berbeda dengan Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang secara konsisten menetapkan UMK lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Barat secara keseluruhan hampir di setiap tahun. Kondisi tersebut mencerminkan biaya hidup yang relatif lebih besar serta kedudukan keduanya sebagai pusat kegiatan ekonomi. Pada 2023, misalnya, UMK Kota Pontianak tercatat sebesar Rp2.701.373 dan Kota Singkawang Rp2.788.198, keduanya melampaui rata-rata provinsi Rp2.608.601. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun UMK di Kalimantan Barat secara umum terus meningkat, perbedaan antara wilayah perkotaan yang lebih berkembang dengan daerah lainnya tetap terlihat jelas.

Keterkaitan antara upah minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota Kalimantan Barat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kondisi perekonomian daerah, kebijakan pemerintah, serta struktur industri yang dominan.

Peningkatan upah minimum kerap dikaitkan dengan naiknya tingkat pengangguran, meskipun dalam beberapa kasus kenaikan tersebut tidak selalu menjadi penghambat terciptanya lapangan kerja baru. Temuan penelitian Yacoub & Firdayanti (2019) serta Salsabila dkk. (2024) menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi upah minimum, jumlah pengangguran juga cenderung bertambah. Salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus menekan pengangguran adalah dengan meningkatkan investasi, baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) (Helvira & Rizki, 2020). Dalam perspektif teori Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan proporsi pendapatan nasional yang dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Selain itu, pertumbuhan akan lebih cepat jika rasio modal terhadap output dapat ditekan (Faisol dkk., 2017). Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Tabel 4 menampilkan nilai proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di kabupaten/kota Kalimantan Barat sepanjang periode 2018–2023.

Tabel 4 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023

Kabupaten/Kota	Data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)				
	2018	2019	2021	2022	2023
Sambas	355,494	400,474	241,103	434,447	581,962
Bengkayang	135,866	316,713	405,267	56,617	178,377
Landak	1,189,331	176,210	479,740	875,917	1,624,532
Mempawah	352,010	378,527	5,265,392	264,089	4,769,515
Sanggau	602,454	947,710	300,979	1,368,692	975,397
Ketapang	693,986	771,943	1,481,467	125,447	3,056,652
Sintang	688,510	2,191,190	499,548	572,425	1,364,544
Kapuas Hulu	496,318	464,386	452,799	1,430,579	159,866
Sekadau	798,986	556,382	244,730	885,783	114,294
Melawi	29,688	575,601	33,618	2,155,880	96,160
Kayong Utara	0	120,593	157,521	330,549	227,431
Kubu Raya	983,442	743,641	961,191	210,484	1,004,917
Kota Pontianak	278,661	51,294	148,612	42,845	638,654
Kota Singkawang	13,639	1,170	101,421	629,164	99,648
Kalimantan Barat	6,591,384	7,695,834	10,773,393	9,382,923	14,891,955

Sumber : BPS Kalimantan Barat (2024)

Berdasarkan Tabel 4, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kalimantan Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menunjukkan pola fluktuatif yang cukup tajam selama periode 2018–2023. Kontribusi terbesar terhadap total PMDN provinsi berasal dari Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya. Pada awal periode, beberapa wilayah seperti Kayong Utara dan Melawi hanya mencatatkan investasi dalam jumlah kecil, bahkan hampir tidak ada pada tahun-tahun tertentu. Namun, pada 2023 Kayong Utara mengalami perkembangan signifikan dengan realisasi investasi sebesar Rp730,5 miliar. Sementara itu, Kota Pontianak, meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam sebesar daerah lain, tetap memperlihatkan tren investasi yang relatif stabil berkat posisinya sebagai pusat aktivitas ekonomi. Pola tersebut menunjukkan bahwa proyek-proyek berskala besar yang berfokus pada sektor tertentu di wilayah strategis lebih berpeluang menarik PMDN dalam

jumlah besar dan memberikan kontribusi penting terhadap total investasi daerah.

Meskipun investasi PMDN memliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tidak selalu ada korelasi langsung antara hasil investasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Banyak hal dapat memengaruhi situasi ini, seperti sektor yang menjadi sasaran investasi, kemampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja lokal, serta tingkat kecocokan keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai arus modal dan potensi pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran, diperlukan kajian terhadap data Penanaman Modal Asing (PMA) di Kalimantan Barat sepanjang periode 2018–2023. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Tabel 5 menyajikan nilai investasi PMA pada tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Barat, yang tercatat dalam ribuan dolar Amerika Serikat.

Tabel 5 Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023

Kabupaten/Kota	Data Penanaman Modal Asing (PMA)				
	2018	2019	2021	2022	2023
Sambas	1,773	14,438	4,890	47,796	10,063
Bengkayang	21,678	132,595	37,920	4	16,711
Landak	16,779	5,441	15,139	46,746	11,761
Mempawah	24,169	3,550	8,529	34,805	48,336
Sanggau	13,732	54,841	14,702	18,662	18,794
Ketapang	375,357	303,521	321,153	8,992	329,080
Sintang	4,292	5,604	16,887	26,909	16,794
Kapuas Hulu	0	0	420	25,596	2,056
Sekadau	1,594	5	5,506	1,538	12,549
Melawi	280	241	2,573	487,915	609
Kayong Utara	3	0	2,573	26,304	0
Kubu Raya	3,297	3,415	2,080	10,109	10,258
Kota Pontianak	28,986	8,889	10,986	489	13,995
Kota Singkawang	0	0	22,256	9,594	185
Kalimantan Barat	491,939	532,540	463,413	745,466	490,469

Sumber : BPS Kalimantan Barat (2024)

Tabel 5 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok dalam realisasi investasi asing di Kalimantan Barat selama periode 2018–2023, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa wilayah, terutama Sanggau dan Ketapang, tercatat sebagai penyumbang utama, dengan Ketapang pada awal periode menempati posisi sebagai daerah dengan nilai FDI tertinggi. Pola ini mencerminkan bahwa arus modal asing lebih banyak terkonsentrasi pada sektor-sektor potensial, seperti perkebunan dan industri pengolahan. Sebaliknya, daerah seperti Kayong Utara, Singkawang, Kapuas Hulu, dan Melawi hanya memperoleh investasi asing dalam jumlah yang sangat terbatas, bahkan nyaris tidak ada pada tahun-tahun tertentu, yang menandakan minimnya daya tarik investor asing di wilayah tersebut.

Meskipun berperan sebagai pusat pemerintahan, Kota Pontianak belum sepenuhnya berkembang menjadi destinasi utama bagi investasi asing. Distribusi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kalimantan Barat masih terkonsentrasi pada proyek berskala besar yang

tersebar di wilayah tertentu dan tidak tersebar secara merata. Sebagian besar penelitian, seperti yang dilakukan oleh Susanti Emilia (2019) serta Silaban & Siagian (2021), menunjukkan bahwa investasi umumnya berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran. Namun, temuan berbeda ditunjukkan oleh Helvira & Rizki (2020) maupun Qamariah dkk. (2022), yang menyimpulkan bahwa investasi tidak selalu berdampak pada penurunan pengangguran, terutama ketika diarahkan pada sektor padat karya atau padat modal. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur menjadi elemen penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pada akhirnya dapat menarik masuknya investasi berskala besar sekaligus membantu menekan tingkat pengangguran.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu pengukur yang paling signifikan dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). IPM mengukur pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, standar hidup layak, serta kesehatan dan umur panjang. Dimensi pendidikan diukur melalui rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sementara aspek kesehatan diukur melaui angka harapan hidup saat lahir. Nilai IPM merupakan hasil penggabungan dari ketiga dimensi tersebut. Dalam metode perhitungan terbaru, indikator ekonomi menggunakan pengganti Produk Domestik Bruot (PDB) per kapita dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, sedangkan indikator literasi digantikan oleh rata-rata lama sekolah (BPS, 2019). Dengan demikian, IPM tidak hanyak menunjukkan tingkat pembangunan manusia, tetapi juga dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial (Garnella dkk., 2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tabel 6 menampilkan perkembangan IPM kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama periode 2013–2023.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023

Kabupaten/Kota	Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2018	2019	2021	2022	2023
Sambas	66.61	67.02	67.1	67.95	68.69
Bengkayang	66.85	67.57	68.04	68.74	69.53
Landak	65.45	65.96	66.21	67.17	68.14
Mempawah	64.9	65.5	66.03	66.94	67.92
Sanggau	65.15	65.67	66.2	66.91	67.77
Ketapang	66.41	67.16	67.43	67.92	68.68
Sintang	66.07	66.7	66.93	67.86	68.67
Kapuas Hulu	65.03	65.65	65.75	66.7	67.67
Sekadau	63.69	64.34	64.93	65.58	66.33
Melawi	65.05	65.54	65.87	66.81	67.76
Kayong Utara	61.82	62.66	62.9	63.81	64.79
Kubu Raya	67.23	67.76	68.16	68.91	69.6
Kota Pontianak	78.56	79.35	79.93	80.48	81.03
Kota Singkawang	71.08	71.72	79.93	72.89	73.39
Kalimantan Barat	66.98	67.65	67.9	68.63	69.41

Sumber : BPS Kalimantan Barat (2024)

Berdasarkan Tabel 6, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu ukuran penting untuk mengukur kualitas hidup masyarakat, yang mencakup tiga dimensi

utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Selama kurun waktu 2018–2023, IPM Kalimantan Barat mengalami peningkatan bertahap dari 66,98 pada 2018 menjadi 69,41 pada 2023. Perbaikan ini mencerminkan adanya kemajuan di bidang sosial maupun ekonomi di provinsi tersebut. Namun, perbedaan yang cukup signifikan terlihat jika dilihat pada tingkat Kabupaten/Kota. Kota Pontianak dan Singkawang secara konsisten mencatat nilai IPM tertinggi, masing-masing mencapai 81,01 dan 77,79 pada tahun 2023, didukung oleh layanan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur ekonomi yang relatif lebih baik. Sebaliknya, daerah seperti Kayong Utara dan Sambas masih menunjukkan IPM di bawah rata-rata provinsi, yakni 67,76 dan 68,89, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam pemerataan pembangunan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Soekapdjo & Oktavia (2021) serta Baihawafi & Sebayar (2023) menegaskan bahwa peningkatan IPM berpotensi menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, temuan Qamariah dkk. (2022) menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, kenaikan IPM justru dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya angka pengangguran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menidentifikasi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menggunakan data panel dan pendekatan kuantitatif, studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antarvariabel tersebut. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, sehingga arah pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perbaikan kualitas tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.